

**IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
(Studi pada Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FERAWATI  
NPM 1816021073**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

Oleh

**FERAWATI**

Dalam perencanaan pembangunan daerah, para OPD seringkali mengalami permasalahan, dalam menyusun dokumen perencanaan seperti terdapat duplikasi, munculnya kegiatan yang tidak direncanakan, dokumentasi berkas atau arsip yang tidak optimal, serta kurangnya koordinasi antar *stakeholders*, sehingga dengan adanya *e-planning* diharapkan dapat membantu OPD dalam berkoordinasi untuk menyusun dokumen perencanaan serta perubahannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan implementasi *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Provinsi Lampung. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-planning* di Bappeda Provinsi Lampung yang diukur menggunakan teori *balanced e-government scorecard* dari Booz Allen dan Hamilton dinilai berhasil. Adapun indikator yang digunakan, yakni : Pertama, pada indikator manfaat, *e-planning* memiliki kualitas layanan melalui fitur yang tersedia, layanan *one stop shop* dan prinsip *user friendly* melalui *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*. Kedua, pada indikator efisiensi, didukung oleh SDM yang berkualitas dengan dibentuknya Tim Pengelola Teknis Implementasi SIPPKD serta pelatihan bimbingan teknis. Ketiga, pada indikator partisipasi, *e-planning* memberikan tempat untuk masyarakat maupun *stakeholders* dalam memberikan usulan. Keempat, pada indikator transparansi, *e-planning* menyajikan informasi secara *real-time*. Kelima, pada indikator manajemen perubahan, dalam pengawasannya *e-planning* memiliki sistem *monitoring* yang dapat mengontrol dan menyimpan seluruh aktivitas pengguna. Sehingga peneliti memberikan saran perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan pemeliharaan server secara berkala untuk menjaga ketersediaan layanan secara optimal, guna mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan Daerah, *E-government*, *E-planning*.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING (Study on E-Planning System in Regional Development Planning Agency of Lampung Province)**

**By**

**FERAWATI**

In regional development planning, OPDs often experience problems, in preparing planning documents such as duplication, the emergence of unplanned activities, non-optimal file documentation or archives, and lack of coordination between stakeholders, so that e-planning is expected to help OPDs in coordinating to prepare planning documents and changes. The purpose of this study was to determine the success of e-planning implementation in regional development planning at Bappeda Lampung Province. The research method used in this research is a descriptive research method with a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of e-planning at Bappeda Lampung Province as measured using the balanced e-government scorecard theory from Booz Allen and Hamilton is considered successful. The indicators used are: First, on the benefit indicator, e-planning has service quality through available features, one stop shop services and user friendly principles through e-planning integrated with e-budgeting. Second, on efficiency indicators, supported by qualified human resources with the establishment of the SIPPKD Implementation Technical Management Team and technical guidance training. Third, on the participation indicator, e-planning provides a place for the community and stakeholders to provide proposals. Fourth, in the transparency indicator, e-planning presents real-time information. Fifth, in the change management indicator, e-planning has a monitoring system that can control and store all user activities. So that researchers provide advice on the need to improve technological infrastructure and regular server maintenance to maintain optimal service availability, in order to support the efficiency and effectiveness of regional development planning.

**Keywords:** Regional Development Planning, E-government, E-planning.

**IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
(Studi pada Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung)**

Oleh

**FERAWATI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**Judul : IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT  
DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada  
Sistem E-Planning di Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Ferawati**

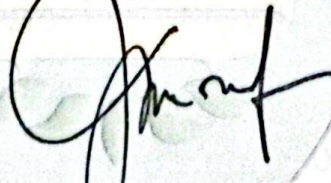
**Nomor Pokok Mahasiswa : 1816021073**

**Jurusan : Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

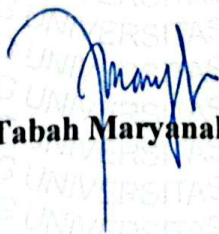
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Darmawan Purba, S.IP., M.IP  
NIP 198106012010121003**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

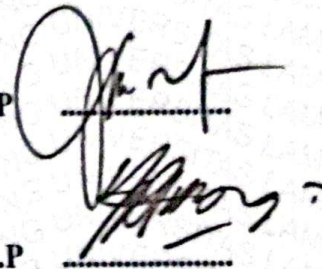


**Tabah Maryanah**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



**Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si**  
**NIP. 197608212006032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Februari 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025  
Yang Membuat Pernyataan



Ferawati  
NPM. 1816021073

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ferawati, lahir di Bandar Lampung, pada 20 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Suta dan Ibu Onyi. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kebon Jeruk pada tahun 2006 hingga 2012.

Dari tahun 2012 sampai 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Bandar Lampung dengan jurusan Desain Produk Kriya Tekstil dan lulus pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lampung, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di BEM Universitas Lampung sebagai Korps Muda BEM Universitas periode 2018, Staf Ahli Kepemudaan BEM Universitas periode 2019, dan Staf Ahli Advokasi Publik BEM Universitas periode 2020.



Penulis telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) periode 1 tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung. Selain itu, penulis telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung selama 6 Bulan dari Agustus 2021 sampai Januari 2022. Penulis juga menjadi Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai PPS pokja data dan informasi di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020, Pemilu 2024, dan Pilkada 2024.

## MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

**(QS. Al-Insyirah : 5-6)**

*“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya.”*

**(Umar bin Khattab)**

*“Dalam perjalanan itu tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini, beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman.”*

**(Jalaludin Rumi)**

## PERSEMBAHAN

*"Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya  
dan ayah adalah kepala sekolahnya."*

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan bagian paling istimewa dari keseluruhan isi skripsi ini, persembahkan kecil penulis untuk kedua orang tua,  
Abah dan Emak.

Ketika seluruh dunia menutup pintu, Abah dan Emak membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga, Abah dan Emak membuka hati untukku. Di saat semuanya salah, Abah dan Emak merangkul dan memperbaiki semuanya. Yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat, dan kasih sayang seluas langit biru serta pengorbanan yang tak lekang oleh waktu serta tak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun.

Dalam perjalanan hidup penulis yang biasa saja ini, penulis akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang penulis bisa, menjadi yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Penulis akan terus melangkah menapaki dunia, tidak gentar menghadapi segala luka yang diciptakan dunia. Terima kasih sudah selalu menjadi penerang yang selalu menerangi pijakku dalam mengartikan makna yang tersirat dari setiap proses yang sudah, sedang dan akan penulis jalani hingga sampai di garis *finish*. Untuk kedua orang tuaku, semoga nikmat sehat selalu terjaga, untuk setiap doa, cinta dan pengorbanan, semoga Allah karuniakan surga terbaik.

## SANWACANA

*Alhamdulillah robbil 'alamin* segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *E-Government* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi pada Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam*, semoga kita diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaatnya, *aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan rintangan, namun itu semua bisa terlewati berkat rahmat dan ridho Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Abahku dan Emakku yang telah mendoakan, mendukung, dan mempercayai anaknya untuk mencapai cita-cita. Kakak dan teteh penulis, teteh Linda, aa Edi, aa Iwan, aa Jun, mas Bambang, mba Dina, yang selalu menyayangi dan mendukung pilihan serta impian adiknya. Ketiga keponakan penulis Eri, Lutfi, Aulia yang selalu menyemangati dan mendukung penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan ilmunya yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan ilmunya yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Prof. Hertanto, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan, ilmu, dan arahan selama proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah mendidik dan membimbing selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
10. Keluarga Besar BAPPEDA Provinsi Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sekaligus menjalankan tugas akhir skripsi ini.
11. Ibu Merta dan Mba Shella selaku staf jurusan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian segala administrasi yang diperlukan.
12. Sepupuku, sekaligus sahabatku sejak kecil Ananda, Iyen, Mita yang selalu mendukung dan sabar menunggu penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah selalu menyayangi, menyemangati, mendukung, dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi. Bahagia selalu untuk kalian.
13. Sahabat-sahabatku di perkuliahan, *best of the best*, sahabatku “Sekelik Warek”, Okta, Nida, Yani, Dhena, Nikita, Apri yang telah berjuang dengan semangat, terima kasih atas seluruh kenangan yang tak terlupakan selama masa-masa perkuliahan, atas semangat, doa, motivasi, kritik yang telah diberikan, sukses selalu untuk kalian, semoga kita bisa bertemu kembali dengan versi terbaik di masa depan. *One and only*, partner KKN dan PKL di sub bidang umum dan kepegawaian, Adelia yang telah memberikan semangat, selalu mendukung dan memberikan afirmasi positif kepada

penulis. Tetap bersinar dan semoga hal-hal baik selalu menjadi sahabat Adelia. Partner PKL, Riska yang telah mendukung dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Bahagia selalu untuk Riska. Semoga persahabatan kita semua terus terjalin.

14. *My beginning*, dua sahabatku yang masih membersamai sampai saat ini sejak 13 tahun yang lalu, Vonika dan Towiyah, yang selalu ada dan mendukung penulis, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita penulis hingga saat ini, terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasinya. Semoga setiap harapan kalian menemukan jalannya, semoga setiap hari membawa kalian berdua lebih dekat dengan kebahagiaan. Sahabatku, Anggun dan Monisa yang telah memberikan semangat dan dukungannya selama ini. Sukses selalu untuk kalian. Semoga persahabatan kita semua terus terjalin.
15. Sahabatku “Jasuper”, Sinta, Eka, Brenda, Indah, Nadya, Mia yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, yang selalu sabar menunggu wisudaku. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya, semoga hal-hal baik selalu menjadi teman baik kalian. Semoga persahabatan kita semua terus terjalin.
16. *Serendipity*, sahabatku satu-satunya anak teknik yang paling keren, Bahrul, yang saat ini sedang berjuang juga melanjutkan gelar sarjananya, yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis tentang kehidupan, atas semangat dan motivasinya, yang sama-sama sebagai pejuang semoga kita tetap hebat di atas keraguan orang lain, tetap kuat di tengah hal-hal yang membuat rapuh. Sukses selalu sampai garis *finish*.
17. *Near*, adik-adikku, Acid dan Adel, yang telah memberikan dukungan dan afirmasi positifnya selama ini, selalu mewarnai hari-hari dengan canda dan tawa, menjadi tempat cerita selama 4 tahun belakangan ini. Adik-adikku Kila, Uswah, Ririn, Axnes, Regita, Natasya, Aruni, Zulfa yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan memberikan semangat. Terima kasih sudah selalu menyayangi, menyemangati, mendukung, dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi, semoga semua do'a baik kembali kepada kalian, *aamiin*.

18. Adik tingkatku, Dominggus dan Intan, yang telah banyak membantu dan menemani terima kasih atas semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Keluarga Besar PPK & PPS TKT Pemilu & Pilkada 2024, khususnya Pokja Datin dan Teknis Tungsura Mba Mega, Mba Salmah, Feni, Mba Kirana, Bang Aria, Bang Agung, Bang Herli, Bang Doni, Salam, Arfio, Bang Edho yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Sahabat sekaligus adik, Azizah, Tesa, Dillah terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini, Sukses selalu untuk kalian semua.
20. *Special*, Nida dan Okta, yang selalu menemani bimbingan selama mengerjakan skripsi, memberikan saran dan kritik, selalu ada di setiap *moment-moment* penting dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas bantuan terbaik dari kalian berdua, semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan pencapaian, kegembiraan, dan petualangan baru yang tak terlupakan untuk kalian. Selalu ingat, manusia terlahir bukan untuk sempurna tapi untuk berguna. Mari melanjutkan perjalanan masing-masing, lalu saling bercerita. Sukses selalu untuk kalian berdua.
21. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya angkatan 2018.
22. Semua pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima Kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan tersebut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Februari 2025

Penulis,

Ferawati

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
2.1 Tinjauan Implementasi .....	14
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	14
2.2 Tinjauan <i>E-Government</i> .....	16
2.2.1 Pengertian <i>E-Government</i> .....	16
2.2.2 Prinsip, Tujuan dan Manfaat <i>E-Government</i> .....	17
2.2.3 Kriteria Penerapan <i>E-Government</i> .....	19
2.3 Tinjauan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	21
2.3.1 Perencanaan Pembangunan.....	21
2.3.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	22
2.4 Tinjauan Sistem <i>E-Planning</i> .....	22
2.4.1 Sistem <i>E-Planning</i> .....	22
2.5 Kerangka Pikir.....	24
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	27
3.1 Tipe Penelitian .....	27
3.2 Lokasi Penelitian .....	28
3.3 Fokus Penelitian .....	28
3.4 Informan Penelitian.....	29



3.5 Jenis Data .....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	32
3.8 Teknik Analisis Data.....	33
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Bappeda Provinsi Lampung .....	34
4.1.1 Sejarah Bappeda Provinsi Lampung.....	34
4.1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung.....	35
4.1.3 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Lampung .....	36
4.1.4 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung.....	37
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
5.1 <i>E-Planning</i> .....	46
5.2 Hasil Penelitian.....	46
5.2.1 Manfaat .....	47
5.2.2 Efisiensi.....	50
5.2.3 Partisipasi.....	53
5.2.4 Transparansi .....	66
5.2.5 Manajemen Perubahan.....	68
5.3 Pembahasan.....	73
5.3.1 Manfaat .....	74
5.3.2 Efisiensi.....	76
5.3.3 Partisipasi.....	79
5.3.4 Transparansi .....	81
5.3.5 Manajemen Perubahan.....	82
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
6.1 Kesimpulan .....	83
6.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Penilaian Pemeringkatan <i>E-Government</i> Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2014-2015 .....	3
Tabel 1. 2 Pemeringkatan <i>E-Government</i> Indonesia antar Provinsi tahun 2015.....	3
Tabel 1. 3 Hasil Pemantauan SPBE Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	4
Tabel 1. 4 Hasil Pemantauan SPBE Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	4
Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3. 1 Informan .....	30
Tabel 5. 1 Rekap Input Kabupaten/Kota Pada E-Musrenbang Tahun 2021 .....	62
Tabel 5. 2 Triangulasi Data .....	71
Tabel 5. 3 Penetapan RKPD Tepat Waktu Tahun 2020-2023 .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	45
Gambar 5. 1 <i>E-Planning</i> dan <i>E-Budgeting</i> tahun 2018.....	47
Gambar 5. 2 SIPPKD saat ini.....	48
Gambar 5. 3 Pembentukan Tim Pengelola Teknis Implementasi SIPPKD .....	52
Gambar 5. 4 Modul Musrenbang Provinsi.....	55
Gambar 5. 5 <i>Landing Page</i> .....	55
Gambar 5. 6 <i>Dashboard</i> .....	56
Gambar 5. 7 Prioritas Daerah.....	56
Gambar 5. 8 Halaman <i>Form</i> .....	56
Gambar 5. 9 Menyimpan Usulan .....	57
Gambar 5. 10 Menambahkan Dokumen Usulan .....	57
Gambar 5. 11 Menambahkan Dokumen Usulan .....	58
Gambar 5. 12 Menambahkan Dokumen Usulan .....	58
Gambar 5. 13 Menambahkan Dokumen Usulan .....	58
Gambar 5. 14 <i>Review</i> Dokumen.....	59
Gambar 5. 15 Cetak Daftar Usulan .....	59
Gambar 5. 16 Arsip Dokumen .....	60
Gambar 5. 17 Memilih Tahun Anggaran .....	60
Gambar 5. 18 Menu Perencanaan .....	60
Gambar 5. 19 Menu Verifikasi.....	61
Gambar 5. 20 Menu Musrenbang.....	61
Gambar 5. 21 Menu Verifikasi Provinsi .....	61
Gambar 5. 22 Proses Usulan .....	62
Gambar 5. 23 <i>Sign Up</i> .....	63
Gambar 5. 24 Biodata Umum .....	63

Gambar 5. 25 Dokumen .....	64
Gambar 5. 26 Akun .....	64
Gambar 5. 27 Pratinjau .....	65
Gambar 5. 28 Menu Bank Data .....	67
Gambar 5. 29 <i>Flow Chart E-Planning dan E-Budgeting</i> .....	74
Gambar 5. 30 Integrasi <i>E-Planning dan E-Budgeting</i> .....	75
Gambar 5. 31 Tahapan Penyusunan RKPD .....	77

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakeuda	: Badan Keuangan Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BMBK	: Bina Marga dan Bina Konstruksi
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara
DPA	: Dokumen Pelaksana Anggaran
DPA-SKPD	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah
<i>E-budgeting</i>	: <i>Electronic Budgeting</i>
<i>E-planning</i>	: <i>Electronic Planning</i>
<i>E-ssh</i>	: <i>Electronic Standar Satuan Harga</i>
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
MCP KPK	: <i>Monitoring Center for Prevention</i> Komisi Pemberantasan Korupsi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
RANPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
R-APBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah

SIPPKD : Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah  
SOP : Standar Operasional Prosedur  
TI : Teknologi Informasi  
TPAD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
UNDP : *United Nations Development Programme*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat. Hal ini yang mendorong banyak pihak di segala bidang untuk melakukan inovasi yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah pemerintahan, yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, atau *e-government*.

Istilah "*e-government*" mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah, yang memungkinkan lembaga pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku bisnis serta memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya.<sup>1</sup> Salah satu tujuan utama penggunaan *e-government* adalah untuk meminimalisir penyimpangan atau maladministrasi serta memberi masyarakat akses ke sumber kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selain itu, penggunaan *e-government* dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dalam hal pelayanan publik. Secara khusus, *e-government* memiliki kemampuan untuk merencanakan, mempromosikan, dan meningkatkan kinerja pemerintah. Melalui transparansi informasi publik, *e-government* membantu mengurangi masalah, meningkatkan kualitas kelembagaan, mendorong urbanisasi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> World Bank, <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>, 2015, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, pukul 09.45.

<sup>2</sup> Muhammad I. Prakoso, dkk, *Perencanaan Pembangunan E-Government : Analisis Visual Menggunakan Vos Viewers*. Jurnal Socioteknologi (Vol. 2, No. 1, 2022), hlm. 98-99.

*E-government* di Indonesia diperkenalkan melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika), lalu didukung oleh Peraturan Penerapan *E-government* melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* di Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003. Tujuan dari pengembangan *e-government*, menurut intruksi presiden tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.<sup>3</sup>

Menurut data *United Nations (UN) E-government Survey 2022* menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 77, survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.71600 di dalam grup *High EGDI* di *United Nations E-Government Survey 2022*.<sup>4</sup> Dengan meningkatnya perkembangan dan pelaksanaan *e-government* di Indonesia, hal tersebut menjadi peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara lebih cepat dan akurat, dan tentunya hal tersebut berdampak langsung pada pengembangan suatu sistem informasi dalam berbagai urusan pemerintahan.

Pengembangan teknologi informasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk keberlangsungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta antar OPD di masing-masing instansi. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Berikut ini adalah penilaian Pemingkatan *E-Government* Indonesia pada Provinsi Lampung tahun 2014 dan 2015 :

---

<sup>3</sup> Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, Lampiran I.

<sup>4</sup> [Menpan.go.id](https://menpan.go.id). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survei e-Government PBB ([menpan.go.id](https://menpan.go.id)), diakses pada tanggal 11 Agustus 2024, Pukul 13.10.



**Tabel 1. 1 Penilaian Pemeringkatan E-Government Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2014-2015**

Tahun	Dimensi					Nilai Rata-Rata	Kategori
	Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan		
2014	1,92	2,00	1,95	1,97	1,60	1,89	KURANG
2015	1,93	1,53	1,73	1,87	1,73	1,76	KURANG

Sumber : RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024

Pemeringkatan *E-Government* di Indonesia antar Provinsi tahun 2015 menempatkan Provinsi Lampung diperingkat tujuh belas. Berikut datanya :

**Tabel 1. 2 Pemeringkatan E-Government Indonesia antar Provinsi tahun 2015**

No.	Provinsi	Nilai Rata-Rata	Kategori
1.	DKI Jakarta	3,39	BAIK
2.	Jawa Barat	3,07	BAIK
3.	Jawa Timur	3,01	BAIK
4.	Gorontalo	2,95	BAIK
5.	Bangka Belitung	2,90	BAIK
6.	D.I. Yogyakarta	2,66	BAIK
7.	Jawa Tengah	2,64	BAIK
8.	Bali	2,63	BAIK
9.	Sumatera Utara	2,62	BAIK
10.	Jambi	2,61	BAIK
11.	Nusa Tenggara Barat	2,54	BAIK
12.	Kalimantan Timur	2,52	BAIK
13.	Aceh	2,51	BAIK
14.	Sumatera Selatan	2,33	KURANG
15.	Sumatera Barat	2,01	KURANG
16.	Kalimantan Selatan	1,88	KURANG
17.	Lampung	1,76	KURANG
18.	Sulawesi Tengah	1,73	KURANG
19.	Sulawesi Barat	1,72	KURANG
20.	Bengkulu	1,54	KURANG
	<b>RATA-RATA</b>	<b>2,50</b>	<b>BAIK</b>

Sumber : [lombokbaratkab.co.id](http://lombokbaratkab.co.id)

Dari tabel diatas, hasil Pemeringkatan *E-Government* Indonesia antar Provinsi pada tahun 2014 dan 2015 menempatkan *e-government* pemerintah daerah Provinsi Lampung berada pada peringkat tujuh belas, dengan kategori kurang, dengan hasil dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan masih dibawah nilai rata-rata.

Dengan berkembangnya sistem teknologi informasi, dari tahun ke tahun penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung mengalami peningkatan.

**Tabel 1. 3 Hasil Pemantauan SPBE Provinsi Lampung Tahun 2022**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	3,37	BAIK
2	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	2,10	CUKUP
3	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	2,43	CUKUP
4	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	2,26	CUKUP
5	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	1,60	KURANG
6	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	2,24	CUKUP
7	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,07	CUKUP
8	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	2,00	CUKUP
9	Pemerintah Kabupaten Mesuji	2,59	CUKUP
10	Pemerintah Kota Metro	2,49	CUKUP
11	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1,50	KURANG

*Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 108 Tahun 2023*

**Tabel 1. 4 Hasil Pemantauan SPBE Provinsi Lampung Tahun 2023**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	3,81	SANGAT BAIK
2	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	2,74	BAIK
3	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	2,68	BAIK
4	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	2,70	BAIK
5	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	2,76	BAIK
6	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	2,55	CUKUP
7	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	2,60	BAIK
8	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	3,08	BAIK
9	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	2,27	CUKUP
10	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	2,91	BAIK
11	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,27	CUKUP
12	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	2,97	BAIK

**Tabel 1. 4 (Lanjutan)**

<b>13</b>	Pemerintah Kabupaten Mesuji	3,57	SANGAT BAIK
<b>14</b>	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	2,32	CUKUP
<b>15</b>	Pemerintah Kota Metro	3,04	BAIK
<b>16</b>	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,15	CUKUP

*Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2024*

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian SPBE provinsi Lampung dalam dua tahun belakangan ini mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2023 SPBE Provinsi Lampung dalam predikat sangat baik dan tidak ada satupun pemerintah daerah yang masuk dalam predikat kurang baik. Tentunya, hal ini memberikan dampak tersendiri bagi *e-government* di Provinsi Lampung. *E-government* yang semakin maju dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sehingga terwujudnya *good governance*.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, *e-government* dapat mempercepat proses administratif dan pengambilan keputusan dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi, yang memungkinkan pengelolaan anggaran menjadi lebih baik, pelaporan yang lebih akurat, dan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana. *E-government* memungkinkan masyarakat menjadi lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, karena dengan adanya sistem yang memfasilitasi konsultasi publik dan umpan balik secara *online*, sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Dengan *e-government* memungkinkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, dan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga membantu dalam sinkronisasi rencana dan kebijakan pembangunan, serta pengelolaan proyek-proyek yang melibatkan berbagai pihak.

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan tentang bagaimana memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah dalam jangka waktu tertentu.<sup>5</sup> Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Fungsi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah adalah perencanaan, karena dengan adanya perencanaan, memungkinkan untuk menentukan bagaimana daerah tersebut akan dibangun di masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensinya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didasari pada data dan informasi yang akurat, valid, dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan merupakan proses tahapan kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup tentang pembangunan, yang telah dipersiapkan secara sistematis. Pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, sesuai dengan pemilihan tujuan yang dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA adalah suatu badan perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran untuk merencanakan pembangunan disuatu daerah maupun di pusat dan perannya bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, dimana peran BAPPEDA sangat penting sebagai badan yang membantu pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi dan peran BAPPEDA sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan daerah merupakan hal pertama yang membantu menetapkan arah pembangunan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan semua para pelaksana pembangunan.<sup>6</sup>

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering menghadapi masalah dalam menyusun perencanaan pembangunan, seperti kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan, menyediakan dukungan data capaian/realisasi kinerja atau anggaran, serta kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah serta relevansi sehingga belum tercapainya sasaran kegiatan dan

---

<sup>5</sup> Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hlm. 6.

<sup>6</sup> Marwah Auliyani, dkk, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal*, Jurnal Cendikia Ilmiah (Vol. 1, No. 2, 2022), hlm. 95.

program. Permasalahan lainnya target rencana setiap tahun yang harus disesuaikan sering kali menjadi masalah tentang perlu tidaknya mengadakan perubahan atau penyesuaian. Tentunya hal itu mengganggu dalam menyusun anggaran prioritas dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sinkronisasi, verifikasi, validasi serta integrasi data beserta alternatif rumusan *action plan* untuk mencapai tujuan organisasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.<sup>7</sup> Selain itu, permasalahan lainnya yaitu data yang diperlukan seringkali tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak terkini sehingga menghambat proses perencanaan yang efektif, serta kurangnya koordinasi antar *stakeholders*, keterlibatan antar *stakeholders* seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, yang menyebabkan tumpang tindih atau konflik dalam perencanaan.

*E-planning* adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. *E-planning* menjadi sangat penting untuk tahapan perencanaan karena seringkali terjadi ketidaksesuaian antara pengelolaan APBD dengan tujuan yang akan dicapai. Tujuan sistem ini diterapkan adalah untuk meningkatkan mutu layanan masyarakat, mempermudah koordinasi di antara lembaga pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah.<sup>8</sup>

Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPPKD yang merupakan sistem informasi yang saling terintegrasi antara perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan daerah. SIPPKD mencakup penggunaan aplikasi e-ssh, *e-planning*, dan *e-budgeting* yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.<sup>9</sup> Penggunaan SIPPKD di Provinsi Lampung telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang aplikasi SIPPKD dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor

---

<sup>7</sup> Egis T. Grandis, *Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar*, hlm. 2.

<sup>8</sup> Sholeh Jamaluddin, dkk, *Perencanaan Pembangunan Berbasis E-planning Di BAPPEDA Provinsi DIY*.

<sup>9</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018, Pasal 1 dan 2.

G/564/VI.02/HK/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Standar Operasional Prosedur aplikasi SIPPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.<sup>10</sup>

SIPPKD pada tahun 2019 telah menghasilkan 22.000 data standar satuan harga, 1.250 data harga satuan pokok kegiatan dan 135 data analisis tanggal biaya pada aplikasi e-ssh. Pada *e-planning* telah menghasilkan RKPD Provinsi Lampung tahun 2019 berbasis RKA sebagai dasar penyusunan KUA PPAS tahun 2019. SIPPKD pada *e-budgeting* telah menghasilkan *output* dokumen KUA PPAS tahun 2019 berbasis RKA, Rancangan Perda APBD tahun 2019, Perda APBD tahun 2019, penjabaran APBD tahun 2019, dan DPA SKPD tahun 2019.<sup>11</sup>

Saat ini dengan berkembangnya teknologi informasi, aplikasi *e-planning* menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran dan lebih transparansi. *E-planning* dibangun untuk memudahkan para penggunanya dalam menghadapi permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Adapun titik lemah dalam tahapan perencanaan dan penganggaran yaitu :

1. Kesulitan *tracking* keterkaitan perencanaan dan penganggaran;
2. Terdapat duplikasi;
3. Muncul kegiatan yang tidak direncanakan;
4. Kesulitan dalam pengendalian dan evaluasi;
5. Penerapan standar belanja (satuan harga) belum optimal;
6. Dokumentasi berkas atau arsip yang tidak optimal.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, peneliti membandingkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan bahan acuan dan perbandingan, serta untuk memperkuat penelitian ini. Selain itu untuk menghindari adanya anggapan

---

<sup>10</sup> Hamartoni Ahadis, *Pemprov Lampung Siap Launching Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah* <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-siap-launching-sistem-informasi-dan-pengelolaan-keuangan-daerah>, diakses pada 13 Agustus 2024, pukul 10.10.

<sup>11</sup> KPK Luncurkan Tata Kelola Anggaran Pemprov Lampung <https://m.republika.co.id>, diakses pada 13 Agustus 2024, pukul 15.40.

<sup>12</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. *Bimtek Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah*.

kesamaan dalam penelitian ini, adapun peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rahmadani (2020)	Pemanfaatan Sistem <i>E-planning</i> dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan	Hasil dari penelitian ini adalah sistem <i>e-planning</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan sudah dimanfaatkan dengan baik dilihat dari intensitas penggunaan, frekuensi serta jumlah user atau pengguna. Yang menjadi hambatan dalam penerapan <i>e-planning</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan adalah sumber daya manusia belum merata dalam perencanaan pembangunan, inkonistensi perencanaan pembangunan karena tekanan politisi dan seringnya perubahan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengatasi hambatan tersebut, diantaranya melakukan pelatihan atau sejenisnya, yang kedua dengan di berlakukannya sistem <i>e-planning</i> ini, yang ketiga dengan cara mengikuti perubahan yang ada dengan cepat dan tepat.
2.	Egis Tektona Grandis	Efektivitas Penerapan Sistem <i>E-Planning</i> Program Pembangunan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar	menggunakan wawancara mendalam. Teori untuk mengukur efektivitas menggunakan teori Gibson. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ketercapaian pengusulan program kegiatan dari setiap OPD sudah dilakukan dengan baik. Keefektifitasan tersebut tampak bahwa keuntungan usulan sistem <i>e-planning</i> terkunci dan terdokumentasikan berupa <i>softcopy</i> , mobilitas pegawai yang hemat waktu dalam meng-input data sehingga adanya pengurangan biaya.
3.	Muhamad Sukarno (2020)	Implementasi Kebijakan <i>E-Planning</i> pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo	Dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam memperoleh data dan informasi. Dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam Sumber data diperoleh dari data primer melalui studi kepustakaan dan data sekunder dengan melakukan wawancara langsung kepada BAPPEDA. Hasil penelitiannya adalah implementasi kebijakan <i>e-planning</i> pada BAPPEDA Kulon Progo telah sesuai dengan arahan PP No. 8



No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			tahun 2008 akan tetapi, masih ditemukan beberapa kendala serta kekurangan tersendiri dari pengaplikasian seperti pengembangan jaringan informasi, proses input data, dan kesiapan dari sebuah sistem atau perangkat
4.	Virgiana Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli (2018)	Analisis Penerapan <i>E-Planning</i> dan <i>E-Budgeting</i> pada Pemerintah Daerah (studi kasus pada pemerintah kabupaten bengkalis)	Hasil dari penelitiannya adalah Penerapan sistem <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> di Pemerintah Kabupaten Bengkalis kurang optimal karena masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik SDM yang potensial dalam pengelolaan aplikasi itu sendiri maupun SDM yang mau untuk konsen di bagian perencanaan dan penganggaran dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), Kabupaten Bengkalis juga masih dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur dalam hal ini ketersediaan jaringan, sehingga penerapan <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> hanya bisa di akses di tempat tertentu saja yaitu Bappeda dan BPKAD.

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024)

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi *e-planning* menggunakan teori penerapan *e-government (balanced e-government scorecard)* yang dikemukakan oleh Booz Allen dan Hamilton. Untuk menggambarkan suatu fenomena dari penerapan sistem yang

diharapkan dapat berjalan sesuai dengan indikator yang ada, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana implementasi sistem *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Provinsi Lampung?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : untuk mengetahui keberhasilan implementasi *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Provinsi Lampung.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambahkan wawasan dan informasi tentang hal yang diteliti serta pengembangan kemampuan berpikir penulis melalui penelitian ini.
  - b. Sebagai acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutannya yang berhubungan dengan *e-government* dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi BAPPEDA Provinsi Lampung.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *e-government* dalam perencanaan pembangunan daerah.

c. Bagi Peneliti

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai *e-government* dalam perencanaan pembangunan daerah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Implementasi

#### 2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara etimologis, implementasi didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan penyelesaian tugas dengan menggunakan sarana untuk mencapai hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi didefinisikan juga sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, dasar implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai sehingga kebijakan tertentu dapat memengaruhi kebijakan lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi adalah keputusan kebijakan dasar, yang dilaksanakan melalui undang-undang, atau dalam bentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting.<sup>14</sup>

Implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan publik, yang tahapan sebelumnya yaitu *agenda setting*, *formulation*, *adoption* dan tahapan sesudahnya yaitu *assesement*. Adapun yang dimaksud dengan implementasi kebijakan merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan antara tindakan dan tujuan. Jadi, dalam konteks kebijakan publik, adanya upaya membentuk kaitan antara tindakan program dengan

---

<sup>13</sup> Ahmad Zubaidi, dkk, *Imajinasi dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*, (Tremgalek : CV Indonesia Imaji, 2022), hlm. 90.

<sup>14</sup> Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*, (Sidoarjo : Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hlm. 15.

tujuan atau sasaran program yang hendak dicapai.<sup>15</sup>

Dalam teknik pelaksanaan atau implementasi suatu kegiatan, terdapat empat unsur yang harus diperhatikan yaitu :

1. Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya;
2. Adanya proses;
3. Hasil yang hendak dicapai;
4. Menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.<sup>16</sup>

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membangun hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran diwujudkan sebagai hasil akhir yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, mencakup pembuatan *policy delivery system* penyelenggaraan kebijaksanaan negara, yang biasanya terdiri dari metode atau sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.<sup>17</sup>

Sifat atau jenis kepentingan yang hendak dicapai oleh kebijakan memengaruhi keberhasilan implementasi. Jenis kebijakan tertentu memiliki dampak terhadap aktivitas proses implementasi.<sup>18</sup>

Kegagalan implementasi terjadi jika implementor tidak memahami standar dan tujuan kebijakan, atau memiliki kepentingan yang berbeda dengan standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang lebih luas terhadap standar dan tujuan kebijakan, akan memberikan peluang keberhasilan implementasi kebijakan.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi merupakan suatu aktivitas atau proses untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas atau proses dari kebijakan dasar, yang biasanya berbentuk undang-undang atau keputusan eksekutif yang penting, berkaitan antara kegiatan program dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ahmad Zubaidi, dkk, *Loc.cit.*

<sup>17</sup> Suparno, *Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

tujuan atau sasaran program yang hendak dicapai. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sifat dan jenis yang hendak dicapai oleh kebijakan, dan penerimaan yang lebih luas terhadap standar dan tujuan kebijakan oleh implementor.

## **2.2 Tinjauan *E-Government***

### **2.2.1 Pengertian *E-Government***

Bank Dunia memperkenalkan istilah “*e-government*” sebagai model untuk menerapkan sistem informasi manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bank Dunia dan UNDP memandang *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pemerintah untuk berhubungan dengan masyarakat, pelaku bisnis, dan Lembaga pemerintahan lainnya.<sup>20</sup> *E-government* adalah pemerosesan teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk berkomunikasi, menyebarluaskan atau mengumpulkan informasi serta memfasilitasi transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Dalam sudut pandang ilmu politik, *e-government* dilihat sebagai alat yang memungkinkan warga berpartisipasi dan bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan perspektif ini, *e-government* dianggap sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi proses politik dan pemerintahan.<sup>22</sup>

Dalam sudut pandang tata kelola ilmu pemerintahan, *e-government* didefinisikan sebagai perubahan proses dan struktur pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan administrasi yang lebih baik, yang mencakup peningkatan dalam hal kualitas layanan publik, melibatkan

---

<sup>20</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Modul Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, hlm. 4.

<sup>21</sup> Sudrajat, dkk, *Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang*, hlm. 2147.

<sup>22</sup> Soetam R. Wicaksono, *Konsep Dasar E-Government*, (Malang : CV Seribu Bintang, 2023), hlm. 7.

masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Definisi ini menekankan pergeseran perspektif tentang cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat.<sup>23</sup>

Zweers dan Planque mendefinisikan *e-government* yang berarti penyediaan informasi, layanan, atau produk yang disiapkan secara elektronik dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas pada tempat dan waktu, serta meningkatkan partisipasi yang lebih banyak pada seluruh kalangan. *E-government* juga dimaksudkan untuk memberikan informasi lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan tempat, informasi yang disediakan dapat diakses tanpa batasan, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>24</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi di bidang pemerintahan untuk memberikan penyediaan informasi, layanan, atau produk lainnya yang telah disiapkan secara elektronik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat, pelaku bisnis, ataupun antar pemerintah lainnya menjadi lebih efektif dan efisien.

### **2.2.2 Prinsip, Tujuan dan Manfaat *E-Government***

Menurut Indrajit pembuatan visi *e-government* yang baik akan berlandaskan pada 4 prinsip, yaitu:

1. Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan yang kompetitif.
3. Memberikan penghargaan terhadap inovasi dan memberikan ruang kesempatan bagi kesalahan.
4. Tekankan pada pencapaian efisiensi.<sup>25</sup>

Tujuan penerapan *e-government* adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab bagi warganya. Melalui *e-government*, masyarakat dapat mengakses informasi, pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif, dan layanan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muhammad Nur, *Faktor Sukses Penerapan E-Government dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa*, 2021, hlm. 14.

<sup>25</sup> Sudrajat, dkk, *Loc.cit.*

pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Indrajit, tujuan pengembangan *e-government* adalah:

1. Dengan *e-government*, pemerintah ingin memberikan akses yang luas mengenai beberapa informasi penting yang dibutuhkan masyarakat dan akses terhadap layanan pemerintah.
2. Meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang berbagai program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat bisa melakukan kontrol dan pertanggungjawaban lebih besar terhadap apa yang dilakukan pemerintah.
3. Dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat yang luas akan menjamin keputusan yang dibuat memenuhi aspirasi masyarakat untuk menuju proses pemerintahan yang transparan dan demokratis.
4. Menggantikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat, dimana mereka bisa mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangi langsung kantor-kantor pemerintahan. Melalui *e-government* masyarakat mempunyai pilihan akses yang lebih banyak.<sup>26</sup>

Menurut Indrajit, manfaat penerapan *e-government* bagi suatu negara adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *good governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.

---

<sup>26</sup> Kajian Pustaka, [E-Government \(Pengertian, Tujuan, Jenis dan Strategi Pengembangan\)](http://kajianpustaka.com) (kajianpustaka.com), diakses pada tanggal 14 Agustus 2024, Pukul 21.00.



5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.<sup>27</sup>

Manfaat dari *e-government* menurut Al Gore dan Tony Blair yaitu berupa:

1. Memperbaiki kinerja suatu pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya.
2. Meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas.
3. Mengurangi biaya administrasi, relasi dan intraksi.
4. Memberikan peluang untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat *up to date*.<sup>28</sup>

### 2.2.3 Kriteria Penerapan *E-Government*

Dalam penelitian yang dilakukan bersama Berstelment, Booz Allen dan Hamilton memperkenalkan apa yang disebut *balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan *e-government*. Ada lima dimensi dalam *balanced e-government scorecard*, yang masing-masing dijelaskan dalam banyak kriteria secara lebih rinci. Kelima kriteria tersebut adalah manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan.

1. Manfaat, dimensi manfaat berhubungan dengan kuantitas dan kualitas layanan yang diberikan serta bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Kriteria ini mencakup beberapa hal yakni cakupan layanan yang telah dilaksanakan sebelumnya, bagaimana layanan dapat diakses dalam “*one stop shop*” dari satu portal yang menghubungkan berbagai layanan, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan ini.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Kajian Pustaka, [E-Government \(Pengertian, Tujuan, Jenis dan Strategi Pengembangan\)](http://kajianpustaka.com) ([kajianpustaka.com](http://kajianpustaka.com)), diakses pada tanggal 14 Agustus 2024, Pukul 21.00.

<sup>28</sup> Sudrajat, dkk, *Loc.cit*.

<sup>29</sup> Eko Indrajit, dkk, *Electronic Government In Action*, hlm. 49.

2. Efisiensi, dimensi efisiensi mengacu pada seberapa cepat teknologi dapat mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Kriteria efisiensi diantaranya yakni ketersediaan arsitektur proses, aplikasi, dan *database* yang bisa berjalan ketika dibutuhkan, perencanaan sumber daya secara efektif, maksimal memanfaatkan platform teknologi informasi dan teknologi pada aspek keseluruhan, kualitas dan ruang lingkup pelatihan untuk karyawan dan staf.<sup>30</sup>
3. Partisipasi, dimensi partisipasi berkaitan dengan pertanyaan apakah layanan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat. Beberapa kriteria dari partisipasi yaitu akses langsung masyarakat ke pihak yang berkepentingan melalui web, pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat, pengaruh dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peluang untuk membahas masalah sosial (tersedianya layanan chat, forum, milis).<sup>31</sup>
4. Transparansi, dimensi transparansi berkaitan dengan apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transparansi, yakni, banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat, apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak, dan *topicality of information*.<sup>32</sup>
5. Manajemen Perubahan, dimensi manajemen perubahan terkait dengan proses implementasi apakah ada proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, di antaranya yakni strategi pengembangan, kualitas kontrol dan *review*, keterlibatan dan motivasi dari pegawai.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 51.

## 2.3 Tinjauan Perencanaan Pembangunan Daerah

### 2.3.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi terbaik untuk mencapai serangkaian tujuan yang diinginkan. Pengertian perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda, dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Di sisi lain, perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan tujuan masa depan serta menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapainya.<sup>34</sup> Sedangkan pembangunan adalah proses perubahan yang berkelanjutan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi ketika melakukan pembangunan adanya sesuatu hal yang berubah dan berbeda. Jika tidak ada perubahan sama sekali, berarti belum disebut sebagai pembangunan.<sup>35</sup>

Mark Tuner dan David Hulme mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses modernisasi perubahan secara menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pra modern ke bentuk penguasaan teknologi dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan karakteristik meningkatkan kesejahteraan ekonomi, stabilisasi politik seperti di dunia Barat.

Menurut Coralie Bryant dan Louise G. Whit, perencanaan pembangunan adalah suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dengan lebih banyak implikasi. Menurut Conyers dan Hills, perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ali K. Mahi & Sri I. Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

<sup>35</sup> Rahmadani, *Pemanfaatan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan*, 2020, hlm.13.

<sup>36</sup> Syamsidar, *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Makassar*, 2020, hlm. 7.

### **2.3.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis untuk melihat suatu daerah akan dibawa ke mana, dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki dari masing-masing daerah.<sup>37</sup>

## **2.4 Tinjauan Sistem *E-Planning***

### **2.4.1 Sistem *E-Planning***

*E-planning* merupakan aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penggunaan *e-planning* menjadi sangat penting dalam tahapan perencanaan mengingat seringkali dihadapkan pada ketidakkonsistenan antara pengelolaan APBD dengan tujuan yang

---

<sup>37</sup> Muhammad I. Patarai, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*, (Makassar: De La Macca, 2017), hlm.160.

akan dicapai. Sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan masyarakat, mempermudah koordinasi di antara lembaga pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah.<sup>38</sup>

Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) adalah sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkup SIPPKD meliputi penggunaan aplikasi *e-ssh*, *e-planning*, dan *e-budgeting* yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

*Electronic planning* atau yang sering disebut *e-planning* adalah perencanaan daerah yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi. *E-planning* meliputi :

- a. Penginputan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan penyusunan RKPD oleh seluruh anggota DPRD.
- b. Penginputan hasil musrenbang program atau kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Sinkronasi kebijakan Pemerintah dengan prioritas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- d. Penginputan Program/Kegiatan lintas OPD, usulan masyarakat, dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD serta perubahan pagu indikatif beserta draft Rencana Kerja Anggaran (RKA), dalam forum gabungan OPD untuk menyempurnakan rancangan awal renja menjadi rancangan renja OPD berbasis RKA.
- e. Penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian dan pengelolaan aplikasi SIPPKD dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan dibantu oleh OPD salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang mempunyai kewenangan menyusun *draft* awal RKPD dengan tahapan meliputi :

1. Usulan pokok pikiran, musrenbang;
2. Pagu renja OPD;

---

<sup>38</sup> Jamaluddin, *Loc.cid*.

3. Penetapan RKPD;
4. Penyusunan Rancangan KUA dan pagu PPAS;
5. Penetapan rancangan akhir.

## 2.5 Kerangka Pikir

Dalam ranah perencanaan pembangunan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering menghadapi masalah dalam menyusun perencanaan pembangunan, adapun permasalahan yang sering dihadapi yaitu ;

- a. Kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan, menyediakan dukungan data capaian/realisasi kinerja atau anggaran.
- b. Kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah serta relevansi sehingga belum tercapainya sasaran kegiatan dan program.
- c. Target rencana setiap tahun yang harus disesuaikan sering kali menjadi masalah tentang perlu tidaknya mengadakan perubahan atau penyesuaian.
- d. Data yang diperlukan seringkali tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak terkini sehingga menghambat proses perencanaan yang efektif.
- e. Kurangnya koordinasi antar *stakeholders*, keterlibatan antar *stakeholders* seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, yang menyebabkan tumpang tindih atau konflik dalam perencanaan.

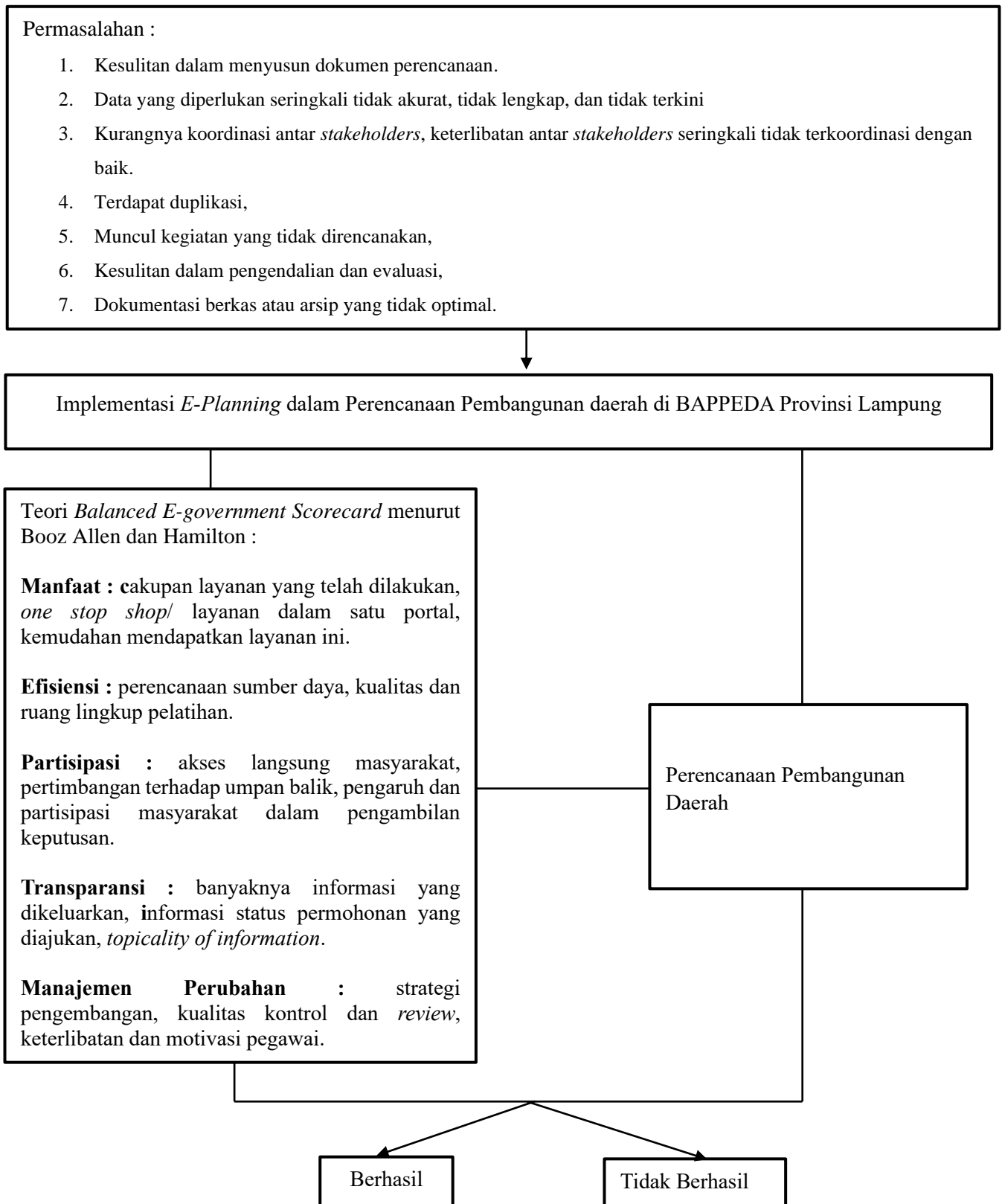
Di tengah semakin berkembangnya teknologi informasi, *e-government* diharapkan mampu membantu tugas pemerintah menjadi lebih mudah, serta dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu wujud dari *e-government* itu sendiri adalah *e-planning*, yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah khususnya di ranah perencanaan pembangunan daerah. Dalam ranah pembangunan daerah pentingnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, adapun titik lemah dalam tahapan perencanaan dan penganggaran yaitu :

1. Kesulitan *tracking* keterkaitan perencanaan dan penganggaran;
2. Terdapat duplikasi;
3. Muncul kegiatan yang tidak direncanakan;

4. Kesulitan dalam pengendalian dan evaluasi;
5. Penerapan standar belanja (satuan harga) belum optimal;
6. Dokumentasi berkas atau arsip yang tidak optimal.

Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan sistem informasi yang saling terintegrasi antara *e-planning* dan *e-budgeting*, sistem informasi ini bertujuan agar antara perencanaan dan penganggaran saling sinkron, karena perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen.

Akhir dari penelitian ini akan memperlihatkan suatu penerapan sistem informasi yaitu *e-planning* yang diharapkan mampu membantu pelaksana pembangunan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**  
(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024)



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.<sup>39</sup> Proses penelitian ini lebih bersifat seni (kurang berpola) dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretatif*, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>40</sup>

Berdasarkan pada uraian diatas, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yaitu data yang mengandung makna. Dengan peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data yang bersifat induktif serta hasil penelitian yang tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna. Peneliti memilih untuk menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk bisa mendeskripsikan secara lebih mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada di

---

<sup>39</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosada Karya 2017), hlm. 2.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alpabeta, 2019), hlm. 18.

lapangan mengenai implementasi salah satu *e-government* yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yaitu sistem *e-planning*.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Alasan dipilihnya pemilihan lokasi ini adalah karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga non departemen yang mempunyai fungsi menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas pola umum pembangunan lima tahun daerah, yang secara langsung terlibat dalam implementasi *e-planning* atau Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD), dan juga dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung merupakan salah satu OPD yang berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam pengendalian dan pengelolaan aplikasi SIPPKD.

### 3.3 Fokus Penelitian

Menurut Spradley, fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.<sup>41</sup> Fokus dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih dalam tahap permukaan tentang situasi sosial, sehingga untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *e-government* seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan memfokuskan pada sistem *e-planning*, yang dilihat dari lima indikator penerapan *e-government*, yaitu manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 275.

1. Manfaat

Pada aspek manfaat, peneliti akan melihat bagaimana kemudahan pemakaian bagi pengguna sistem ini, sehingga layanan bisa dirasakan oleh pengguna sesuai kebutuhan.

2. Efisiensi

Pada aspek efisiensi, peneliti akan melihat bagaimana sistem ini mengurangi proses kerja dari sisi waktu dan meningkatkan kualitas serta produktivitas, dan bagaimana sistem ini menghasilkan kualitas layanan yang lebih baik.

3. Partisipasi

Pada aspek partisipasi, peneliti akan melihat bagaimana peran *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.

4. Transparansi

Pada aspek transparansi, terkait dimana kebutuhan *stakeholders* maupun masyarakat yang semakin terbuka menjadi semakin terasa. Oleh karena itu, pada aspek transparansi peneliti akan melihat informasi yang disampaikan sehingga tercapainya keterbukaan informasi menuju proses transparansi.

5. Manajemen Perubahan

Ada banyak kriteria dalam hal manajemen perubahan ini, yang paling penting yakni perencanaan strategis dan strategis pengembangan kedepan. Implementasi selalu bergerak secara dinamis, sehingga diperlukannya pengawasan yang ketat. Pada aspek ini, peneliti akan melihat bagaimana rentang kendali antara struktur organisasi, sehingga proses pelaksanaan, kontrol, *monitoring* berjalan.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>42</sup> Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangan hal-hal tertentu. Penentuan informan ini ditentukan oleh tujuan yang akan didapat oleh peneliti dengan mewawancarai informan tersebut,

---

<sup>42</sup> Lexy Moelong, *Op.cit.*, hlm. 132.

karena informan memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diketahui dalam penelitian tersebut dan dianggap memiliki informasi lebih dengan penelitian yang akan dilakukan

Berdasarkan uraian diatas, maka informan dalam penelitian adalah beberapa pegawai Bappeda Provinsi Lampung pada sub bidang program dan sub bidang Perencanaan Makro, karena beberapa pegawai di sub bidang program dan perencanaan makro merupakan *user e-planning*.

**Tabel 3. 1 Informan**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	M. Roby Satria Pratama, ST	Laki-laki	Kepala Sub Bagian Program
2.	Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L	Laki-laki	Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
3.	Radius Prawira Negara, S.ST	Laki-laki	Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Makro

*Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2024*

### 3.5 Jenis Data

Terdapat sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen lain. Apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>43</sup>

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>44</sup> Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer dan hasil observasi mengenai

<sup>43</sup> Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 296.

<sup>44</sup> *Ibid.*

implementasi *e-planning*.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat didapatkan dari berbagai dokumen dan segala sumber tertulis. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal artikel, serta situs di internet yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Mashall menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>45</sup> Penelitian ini menggunakan *passif participation*, dimana dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

#### 2. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>46</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 297.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 304.

menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>47</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi menggunakan *handphone* untuk *recording* dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis.

## 3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul adapun kegiatan pengolahan data, antara lain :

### 1. *Editing*

*Editing* merupakan pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber.

### 2. Interpretasi

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan selanjutnya diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 314.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>48</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasannya dan kedalaman wawancara yang tinggi.<sup>49</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>50</sup>

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Data hasil penyajian data bila telah didukung oleh data-data yang akurat, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 325.

<sup>49</sup> *Ibid*.

<sup>50</sup> *Ibid*.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Bappeda Provinsi Lampung**

#### **4.1.1 Sejarah Bappeda Provinsi Lampung**

Bappeda Provinsi Lampung awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, dan Permendagri No. 185 tahun 1980, serta Peraturan Daerah No. 9 tahun 1981, yang mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Pada Era Undang-Undang No. 22 tahun 1999, Era Desentralisasi atau Otonomi Daerah, Bappeda Provinsi Lampung dibangun kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000, dan ditetapkan dalam bentuk struktur organisasi “Badan Provinsi” berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2000.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat signifikan, antara struktur Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 1981 dengan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2000. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Ketua Bappeda Tingkat I Lampung” menjadi “Kepala Bappeda Provinsi Lampung”, (2) dihapuskannya posisi Wakil Ketua Bappeda pada eselon IIB, (3) dileburkannya Organisasi Biro PDE (Pusat Data Elektronik) ke dalam Bappeda, (4) dihapuskannya “Bidang Penelitian “ pada Bappeda dan (5) dibentuknya Balitbang Provinsi. Namun, pada tahun 2007 dilakukan kembali evaluasi terhadap seluruh organisasi untuk melihat efektivitas struktur organisasi yang ada sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 yang hasilnya ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 dimana Bappeda saat ini mendapat tambahan dua bidang kembali yaitu UPT Data dan Bidang Penelitian yang merupakan penggabungan kembali Balitbangda ke dalam organisasi Bappeda.



Tahun 2013 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013. Berdasarkan Struktur Organisasi Bappeda yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 terjadi perubahan Struktur Bappeda Provinsi Lampung dengan penambahan Bidang Pendanaan dan Pembangunan, serta penghapusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan menjadi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah mengalami perubahan kewenangan sehingga nomenklatur maupun struktur organisasi OPD perlu disesuaikan. Perubahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung.

#### **4.1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam penetapan program dan kegiatan nasional;
- d. Penyusunan PPA berkoordinasi dengan TPAD;
- e. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergisitas antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- f. Pengoordinasian kelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan, serta pengalokasian dana untuk pembangunan daerah;
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh perangkat daerah Provinsi;
- j. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada Bappeda;
- k. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi terdiri dari : Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Lampung**

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024, visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Visi : Rakyat Lampung Berjaya (Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing,  
dan Sejahtera.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024, sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung**

1. Kepala BAPPEDA mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan penyusunan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA;
  - c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA; dan
  - e. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA.
2. Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyusunan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. Perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi umum;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan pengoordinasian bahan penyusunan naskah dinas;
- e. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi penegakan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi dukungan pembinaan serta pengawasan penggunaan anggaran;
- g. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan verifikasi laporan tingkat kehadiran dan penilaian kinerja aparatur;
- i. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan;
- j. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan humas dan penyelenggaraan informasi publik;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Pengoordinasian penataan kelembagaan dan tata laksana unit kerja dalam rangka penyelenggaraan fungsi;
- m. Pengoordinasian penyelenggaraan usulan pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan pejabat fungsional perencana berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- n. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
- o. Pemberian masukan kepada pimpinan terkait pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan makro, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. Mengoordinasikan dan menyelaraskan penyusunan dan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
  - c. Melakukan penyelarasan program bidang perencanaan makro pembangunan daerah;
  - d. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - e. Mengoordinasikan pembinaan teknis pengendalian kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi;
  - g. Melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - h. Menyiapkan bahan analisis evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Kabupaten/Kota;
  - i. Mengevaluasi perencanaan pembangunan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan dan hasil rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi;
  - j. Mengevaluasi perencanaan pembangunan meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi;
  - k. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian rencana pembangunan kabupaten/kota dan provinsi;

- l. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala
  - n. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan sistem pemantauan, pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
  - b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian;
  - d. Pengoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang Perekonomian;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perekonomian;
  - f. Pengoordinasian substansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Perekonomian;
  - g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian;
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian;
  - i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian;
  - j. Pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan

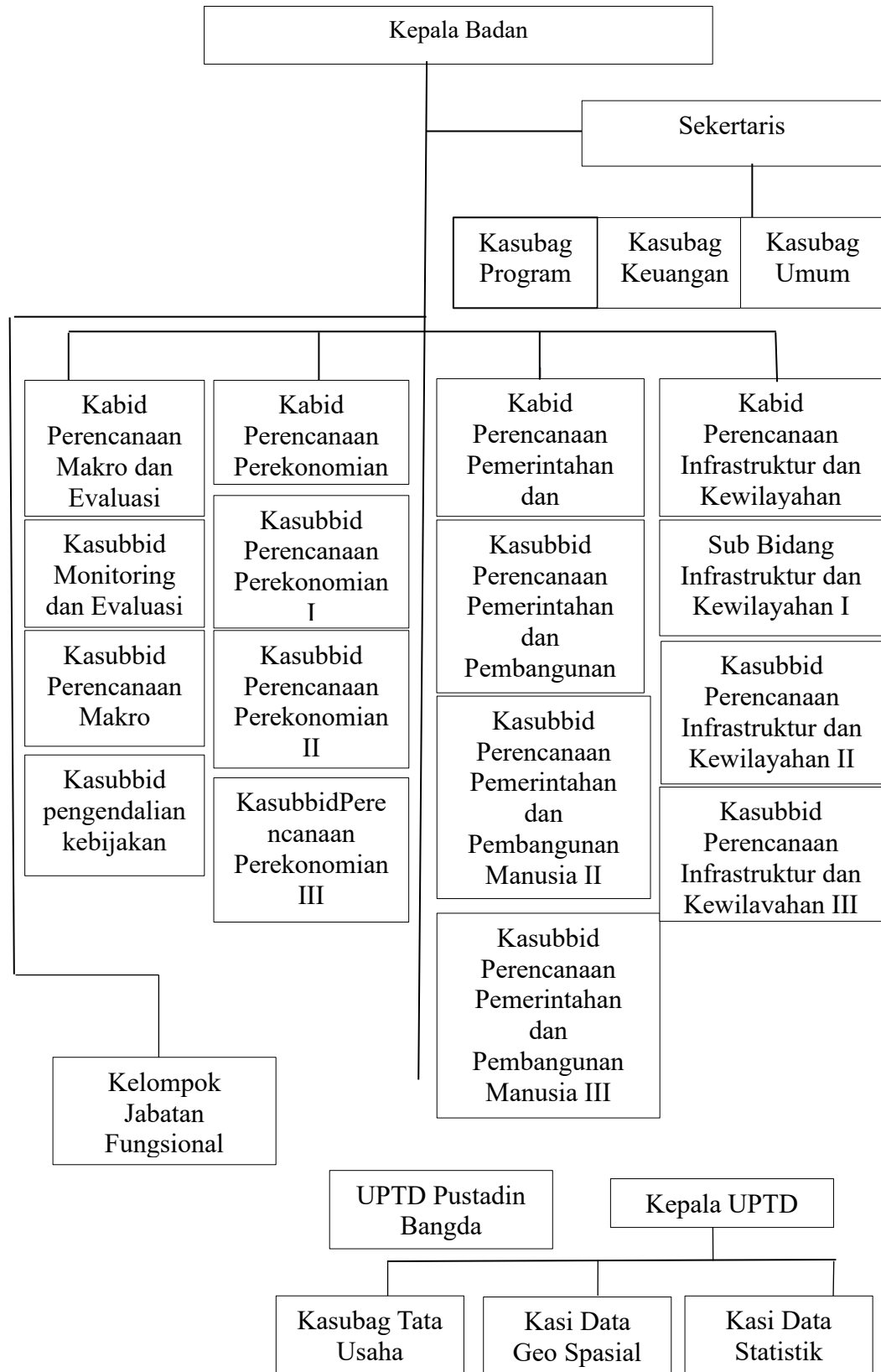
- dalam penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian;
- k. Pengoordinasian dan pengevaluasi hasil capaian pembangunan pada perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
  - l. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Perekonomian;
  - m. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama pembangunan antar daerah Bidang Perekonomian;
5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. Pengoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. Pengoordinasian substansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - j. Pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - k. Pengoordinasian dan pengevaluasi hasil capaian pembangunan pada perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - d. Pengoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



- e. Pengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pengoordinasian substansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- j. Pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. Pengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Pembangunan antar Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- o. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi**

(Sumber : Bappeda.lampungprov.go.id, diolah Peneliti, 2024)

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai implementasi *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Provinsi Lampung menggunakan indikator teori *balanced e-government scorecard* dari Booz Allen dan Hamilton berhasil terpenuhi. Berikut penjelasannya :

#### 1. Manfaat

Pada indikator manfaat dinilai berhasil karena implementasi *e-planning* dilengkapi dengan kualitas layanan melalui fitur yang tersedia yakni modul perencanaan yang terdiri dari RPJMD, renstra, RKPD, pokir, musrenbang, usulan masyarakat yang dapat memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu, *e-planning* memberikan aksesibilitas layanan dalam satu portal dan prinsip *user friendly* dengan terintegrasinya *e-planning* dan *e-budgeting* yang dapat memudahkan dalam hal dokumentasi, pengadministrasian, serta olah data perencanaan sampai penganggaran.

#### 2 . Efisiensi

Pada indikator efisiensi dinilai berhasil karena implementasi *e-planning* didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Lampung membangun sebuah Tim Pengelola Teknis Implementasi SIPPKD. Selain itu, BAPPEDA Provinsi Lampung dalam sisi perencanaannya memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada *stakeholders* di 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga implementasi *e-planning* dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kualitas layanan yang efektif dan efisien.

### 3. Partisipasi

Pada indikator partisipasi dinilai berhasil karena *e-planning* memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat maupun *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyampaian pendapat atau usulan. Masyarakat dapat memberikan usulan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi dengan membuat akun pemohon menggunakan NIK melalui sistem *e-planning*. *E-planning* juga memberikan umpan balik dari perangkat daerah yang bersangkutan melalui tinjauan usulan masyarakat apakah diterima atau ditolak. Penyusunan RKPD yang melalui pendekatan bawah-atas memberikan ruang adanya partisipasi masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

### 4. Transparansi

Pada indikator transparansi dinilai berhasil karena *e-planning* menyediakan keterbukaan informasi melalui menu bank data dimana menu tersebut menyajikan mengenai informasi seputar perencanaan pembangunan daerah dan keuangan yang disajikan secara *real-time*. Selain itu, dengan implementasi *e-planning* juga para OPD tidak dapat menambahkan program kegiatan secara tiba-tiba, program kegiatan yang direncanakan, maka itulah program kegiatan yang dikerjakan.

### 5. Manajemen Perubahan

Pada indikator manajemen perubahan dinilai berhasil karena *e-planning* dilengkapi sistem *monitoring* yang dapat mengawasi dan menyimpan semua aktivitas pengguna aplikasi mulai dari waktu *login*, penggunaan menu, sub menu, sub-sub menu, aksi tambah, ubah, hapus, lihat, cetak, lokasi pengguna, nama perangkat pengguna. sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya. Selain itu, sistem ini juga diawasi oleh KPK melalui inspektorat, dan BAPPEDA Provinsi Lampung di sisi perencanaannya.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *e-planning*, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan pemeliharaan server secara berkala untuk menjaga ketersediaan layanan secara optimal, dan juga untuk meminimalisir gangguan dalam server *e-planning*, serta untuk meningkatkan pengoperasian *e-planning* agar dapat beroperasi secara sinergis guna mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan di Bappeda Provinsi Lampung.
2. Selain bimbingan teknis yang dilakukan secara formal, di samping itu perlunya bimbingan teknis secara non-formal atau pendekatan secara langsung maupun secara emosional, atau adanya forum diskusi sehingga antar OPD dapat berbagi ide, konsep, pemahaman, dan kemampuan satu sama lain.
3. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga BAPPEDA sangat perlu memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk dapat memberikan usulannya, sehingga masyarakat akan lebih aktif ikut serta tidak hanya melalui musrenbang tingkat desa/kelurahan saja, melainkan partisipasi dengan memberikan usulan secara *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government In Action*.

Lexy, Moleong. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Mahi, Kabul Ali. & Trigunarso, Indra Sri. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori & Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Patarai, Idris Muhammad. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. Makassar: De La Macca.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Wicaksono, Rizky Soetam. 2023. *Konsep Dasar E-Government*. Malang: CV Seribu Bintang.

Zubaidi, Ahmad, et al. 2022. *Imajinasi dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*. Trenggalek : CV Indonesia Imaji.

### Jurnal/Skripsi

Auliyani, Marwah, et al. 2022. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal*. Jurnal Cendikia Ilmiah. Vol. 1, No. 2.

Grandis, Tektona Egis. *Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar*.

Jamaluddin, Sholeh, et al. *Perencanaan Pembangunan Berbasis E-planning Di BAPPEDA Provinsi DIY*.

- Kurniawati, Dita. 2017. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh Perangkat Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ningsih, Virgiana, dkk. 2018. *Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)*. Jurnal Ekonomi.
- Nur, Muhammad. 2021. *Faktor Sukses Penerapan E-Government dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa*.
- Prakoso, Muhammad Ivan, dkk. 2022. *Perencanaan Pembangunan E-Government : Analisis Visual Menggunakan Vos Viewers*. Jurnal Sositologi, Vol. 2 No. 1.
- Rahmadani. 2020. *Pemanfaatan Sistem E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan*.
- Sudrajat, Kharisma Raharwindy, dkk. *Efektivitas Penyelenggaraan E-government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang*. Jurnal Administrasi politik. Vol. 1, No. 2.
- Sukarno, Mohamad. 2020. *Implementasi Kebijakan E-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan.
- Syamsidar. 2020. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

## Artikel

- Ahadis, Hamartoni. Februari 2019. *Pemprov Lampung Siap Launching Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah* <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-siap-launching-sistem-informasi-dan-pengelolaan-keuangan-daerah>, diakses pada 13 Agustus 2024, Pukul 10.10.
- Kajian Pustaka, [E-Government \(Pengertian, Tujuan, Jenis dan Strategi Pengembangan\) \(kajianpustaka.com\)](https://www.kajianpustaka.com), diakses pada tanggal 14 Agustus 2024, Pukul 21.00.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. [menpan.go.id](https://menpan.go.id). diakses pada tanggal 11 Agustus 2024, Pukul 13.10.



Republica. *KPK Luncurkan Tata Kelola Anggaran Pemprov Lampung* <https://m.republika.co.id>. diakses pada tanggal 13 Agustus 2024, Pukul 15.40.

*World Bank*. 2015. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, Pukul 09.45.

## **Dokumen**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. *Revisi Renstra 2019-2024*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. *RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024*.

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/80/VI.02/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung tahun 2020.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Lembaga Administrasi Negara. *Modul Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi*.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.